

**DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI
(Studi kasus diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**OLEH
NAMA : YOSHUA ARIZKY PUNUF**

NIM : 21310130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoshua Arizky Punuf

Nim : 21310130

Alamat : Oesapa RT/RW 039/013 Kelurahan Oesapa,Kecamatan Kelapa lima,Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 28 juli 2025

Penulis



Yoshua arizky Punuf

21310207

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

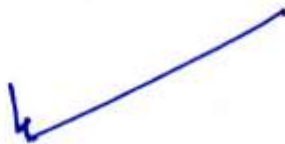
**DESKRIPSI PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN EKSEKUSI**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang)

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH.,M.Hum
NUPTK : 9152739640130063



Jeremia Alexander Wewo,SH.,M.H
NUPTK : 6137770671130343



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Senin, 28 (dua puluh delapan) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Soleman Kette, SH., M.Hum
2. Jeremia Alexander Wewo, S.H., MH
3. Elty Novelina Silaban, SH., M.Hum

TANDA TANGAN

Kupang, 28 Juli 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum NUPTK
7862752653130072

MOTTO

**Karena masa depan sungguh ada dan harapan mu tidak akan pernah
hilang**

“Amsal 23:18”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sumber segala hikmat dan akal budi yang selalu menuntun dan menyertai serta menjawab semua pergumulan menyelesaikan studi perkuliahan sampai selesai.
2. Orang tua tercinta, Bapa Abraham Punuf, Mama Alm Adriana Sae, Serta Ibu sambung saya Mariyati Nabunome yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Kepada Saudara-saudara saya, Tabita Punuf, Eunike Punuf, Louisa Punuf dan Jhon Sultan Punuf yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Sahabat tersayang, Ardi Nenabu, Risal Edon, Juan Koro , Aurel Lakusaba, Maya Ndolu, Rya Banunaek, Tresna nggadas, Sammy Djaga, Riki Nitbani Dan Allan Nitbani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Serta semua teman kelas Adagium 21 yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas segara Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Deskripsi Putusan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang)

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT. Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon S.H., Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas Hukum dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.

3. Bapak Soleman Kette,SH.M.Hum, Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Jeremia Alexander Wewo,SH.,M.H, Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Tonji Ch. Rafael, SH.,M.H Selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu Penulis dalam hal administrasi selama Penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat

bagi pembaca. Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati dan Menyertai kita semua.

Kupang, 11 Juni 2025

Penulis

Yoshua Arizky Punuf

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Keaslian Penelitian	15
E. Metode Penelitian	17
1. Sifat Penelitian	18
2. Jenis Penelitian	18
3. Variabel Penelitian	18
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Perkara perdata	21
a. Pengertian perkara perdata	21
b. Sumber-sumber hukum acara perdata	23
c. Ciri-ciri perkara perdata	24
B. Pihak-pihak dalam perkara perdata	25
C. Proses penegakan hukum perkara perdata	26
a. Gugatan.....	26
b. Jawab-menjawab	28
c. Pembuktian alat bukti	29
d. Putusan Hakim	33
1) Pengertian putusan hakim.....	33

2) Syarat-syarat putusan.....	34
3) Jenis-jenis putusan.....	38
D. Putusan non executable	46
a. Pengertian putusan Non executable	46
b. Alasan-alasan hukum putusan tidak dapat dieksekusi (Non executable)	48
c. Akibat hukum yang timbul jika putusan tidak dapat di eksekusi (Non executable)	49
E. Pelaksanaan perkara perdata	50
a. pengertian eksekusi	50
b. Asas-asas eksekusi	52
c. dasar Hukum Eksekusi sebagai upaya pelaksanaan putusan perkara	54
d. Prosedur eksekusi putusan dalam perkara perdata	56
e. Upaya Hukum	62
1) Upaya Hukum biasa	62
2) Upaya Hukum luar biasa	65
f. Hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi	66
g. E-court	74
1) Pengertian E-court.....	74
2) Pengaturan <i>E-court</i> Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia	77
3) Penerapan <i>E-court</i> Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia	79
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Deskripsi Hasil Penelitian	81
B. Analisis Hasil Penelitian	94

BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	118

ABSTRAK
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI
(Studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang)

Yoshua Arizky Punuf

Nim : 21310130

Judul : Deskripsi Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Rumusan Masalah yang dikaji oleh penulis adalah 1) Mengapa terdapat Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi ? 2) Bagaimana akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi ? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah untuk mengetahui. 1) Untuk mengetahui alasan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi, 2) untuk mengetahui akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Variabel adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : faktor yang mempengaruhi yakni terkait Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Studi kasus di wilayah hukum pengadilan negeri kupang) Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi serta akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil analisis penelitian yaitu alasan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena: a) Ketidakjelasan batas objek eksekusi. b) Adanya pihak lain yang menguasai lokasi objek eksekusi. c) Keamanan. d) alasan teknis. 2) Akibat Hukum bagi Putuan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi, yaitu a) tidak tercapainya kepastian Hukum, b) Terhambatnya perlindungan Hukum bagi pihak yang menang, c) kerugian bagi kreditor atau termohon eksekusi, d) Berpotensi timbulnya perlawanan eksekusi (Derden Verzet atau Verzet), e) kemungkinan timbulnya gugatan baru, f) penurunan wibawa lembaga Pengadilan, g) penerapan prinsip Non Executable Judgment. Saran dari penulis yaitu : 1) Amar Putusan Harus Eksekutabel, Hakim tidak hanya perlu memutus perkara dengan benar, tetapi juga memastikan bahwa amar putusan bisa dilaksanakan. Putusan harus konkret, tidak multitafsir, dan memiliki deskripsi objek yang bisa dipetakan secara nyata. 2) Reformasi Hukum Acara Hukum acara perdata, saat ini dianggap kurang responsif terhadap kendala eksekusi. 3) Pemberdayaan Juru Sita, Juru sita adalah ujung tombak dalam pelaksanaan eksekusi. Mereka perlu diberikan pelatihan hukum dan teknis (misalnya soal pengukuran tanah), perlindungan hukum, serta sarana pendukung seperti pengawalan keamanan. 4) Koordinasi Antar Instansi, Pengadilan tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari pihak kepolisian, Satpol PP, bahkan pemerintah daerah sangat penting. 5) Sanksi Tegas Bagi Penghambat Eksekusi, 6) Edukasi Hukum untuk Masyarakat, Banyak masyarakat tidak memahami bahwa putusan pengadilan adalah final dan wajib dipatuhi.

Kata kunci: kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan

ABSTRACT

DESCRIPTION OF FINAL AND BINDING COURT DECISIONS THAT CANNOT BE EXECUTED

(A Case Study in the Jurisdiction of the District Court of Kupang)

Yoshua arizky Punuf

Nim : 21310130

Title: Description of Court Decisions with Permanent Legal Force That Cannot Be Executed
The research questions explored by the author are: 1) Why are there court decisions with permanent legal force that cannot be executed? 2) What are the legal consequences of court decisions with permanent legal force that cannot be executed? The author's objectives are: 1) To understand the reasons why court decisions with permanent legal force cannot be executed, and 2) to understand the legal consequences of court decisions with permanent legal force that cannot be executed. The research approach used by the prospective researcher in this study is descriptive, meaning it seeks to describe and elaborate on the objects and subjects of research in a deep, broad, and detailed manner. The descriptive nature of this research aims to explain, illustrate, and elaborate on court decisions that cannot be executed and the legal consequences of such unexecutable court decisions. This research uses a normative research type. Variables are factors that constitute the core problem to be investigated. The independent variable in this study is: influencing factors related to court decisions that cannot be executed (case study in the jurisdiction of the Kupang District Court). The dependent variable is a variable that depends on the independent variable. The dependent variable in this study is: unexecutable court decisions and the legal consequences of court decisions that cannot be executed. The type and source of data used in this research is secondary data. Based on the results of the research analysis, the reasons why court decisions with permanent legal force cannot be executed are: a) Unclear boundaries of the execution object. b) The presence of other parties controlling the location of the execution object. c) Security concerns. d) Technical reasons. The legal consequences for court decisions with permanent legal force that cannot be executed are: a) Failure to achieve legal certainty. b) Hindrance to legal protection for the winning party. c) Losses for the creditor or the party subject to execution. d) Potential for execution opposition (Derden Verzet or Verzet). e) Possibility of new lawsuits arising. f) Decrease in the authority of the judicial institution. g) Application of the principle of Non-Executable Judgment. The author's suggestions are: Recommendations Enforceable Verdicts: Judges not only need to rule on cases correctly but also ensure that the verdict can be executed. Decisions must be concrete, unambiguous, and include a description of the object that can be genuinely mapped. Procedural Law Reform: Current civil procedural law is considered less responsive to execution obstacles. Revisions are needed to provisions that provide more effective execution power, including procedures for execution requests, supervision, and coercive measures against defiant parties. Empowerment of Bailiffs: Bailiffs are at the forefront of executing court decisions. They need to be provided with legal and technical training (e.g., land measurement), legal protection, and supporting facilities such as security escorts. Inter-Agency Coordination: The court cannot work alone. Support from the police, Public Order Agency (Satpol PP), and even local government is crucial. This coordination must be structured and formal, not just ad hoc. Strict Sanctions for Execution Obstruction: Parties who defy court decisions must be subjected to administrative, criminal, or civil sanctions to create a deterrent effect. This is also part of enforcing the supremacy of law. Legal Education for the Public: Therefore, legal education from judicial institutions or legal agencies is needed to increase public legal awareness.

Keywords: permanent legal force, court decisio

